

**IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI GAMPONG BADA KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NADILA SARI
NIM. 160802088**

**Mahasiswa Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadila Sari
NIM : 160802088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 Agustus 1998
Alamat : Desa Bada, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Nadila Sari
NIM. 160802088

**IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI GAMPONG BADA KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NADILA SARI
NIM. 160802088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

**IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI GAMPONG BADA KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

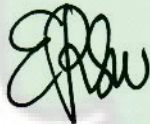
Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal :

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

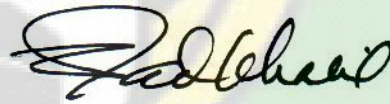
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



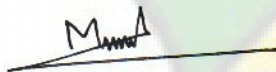
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Sekretaris



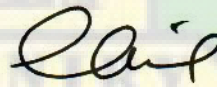
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji I



Muazzinah, M.PA
NIP. 198411252019032012

Penguji II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim dan 604 Gampong/Desa. Luas Wilayah kabupaten Aceh Besar adalah 2.903.50 km², sebagian besar berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Tahun 2020 lalu, Angka kemiskinan di Aceh Besar sebesar 13,84% ditargetkan turun sebesar 2,84% di tahun 2021 ini. Gampong Bada adalah salah satu gampong di Kecamatan Ingin Jaya dan PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2012, dengan jumlah 7 KPM dan tahun 2017 sebanyak 13 KPM. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa uang, dan sembako sejak tahun 2019. Fenomena di lapangan menunjukkan pelaksanaan PKH ini masih belum tepat sasaran, sedangkan tujuan program PKH adalah mengatasi masalah kemiskinan, implementasi PKH diharapkan lebih optimal sehingga tujuan dari program ini dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan data dengan cara mengumpulkan, menjangkau, serta mengolah data atau informasi untuk dipelajari dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Bantuan PKH di Gampong Bada sudah terlaksana dengan baik, Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada, namun masih terdapat kendala terkait dengan Implementasi Bantuan PKH di Gampong Bada. Adapun kendala ataupun hambatan yang membuat pelaksanaan Bantuan PKH belum berjalan maksimal yaitu komunikasi antara pusat dan pendamping belum berjalan maksimal mengenai ketentuan-ketentuan terbaru terkait bantuan PKH. Terhadap penerima yang sudah tidak tepat sasaran, pendamping PKH dan perangkat desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data.

Kata Kunci : *Implementasi, PKH, Keluarga Harapan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”**. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Suhalmi dan Ibunda Nazariah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

Akhirnya inilah persembahan yang dapat Ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti Ananda. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti, Suami tersayang Abang Maulizar, Nenek, Bunda, Makngoh, Dek Ayin dan sepupu-sepupu peneliti lainnya.

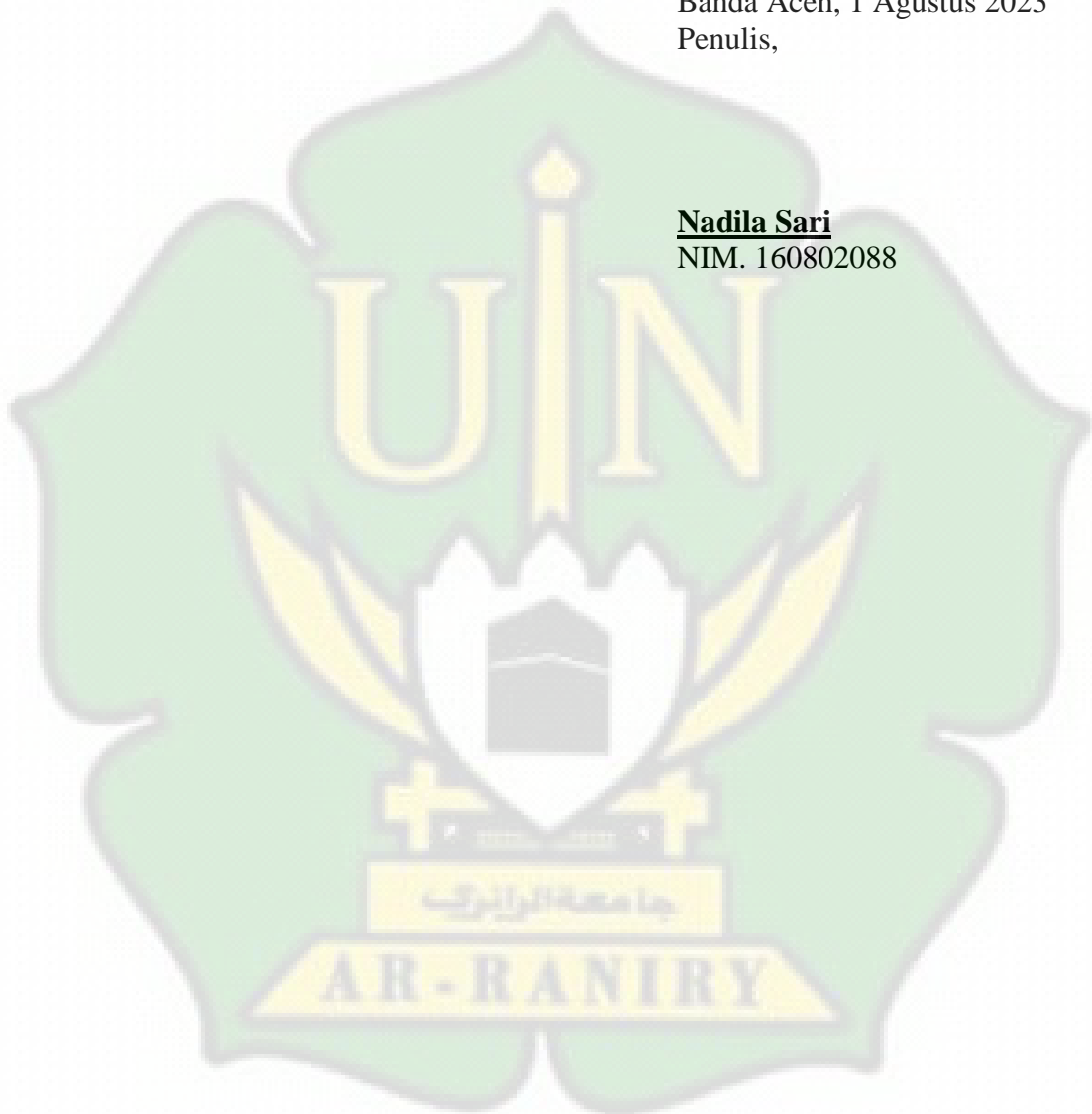
Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Muazzinah, M.PA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rasa Hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat peneliti ucapkan hangan dengan kata-kata kepada Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepada perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik peneliti, Kak Tari, Kak Kiki, Ulfa dan teman-teman leting 2016 Ilmu Adminitrasi Negara lainnya.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023
Penulis,

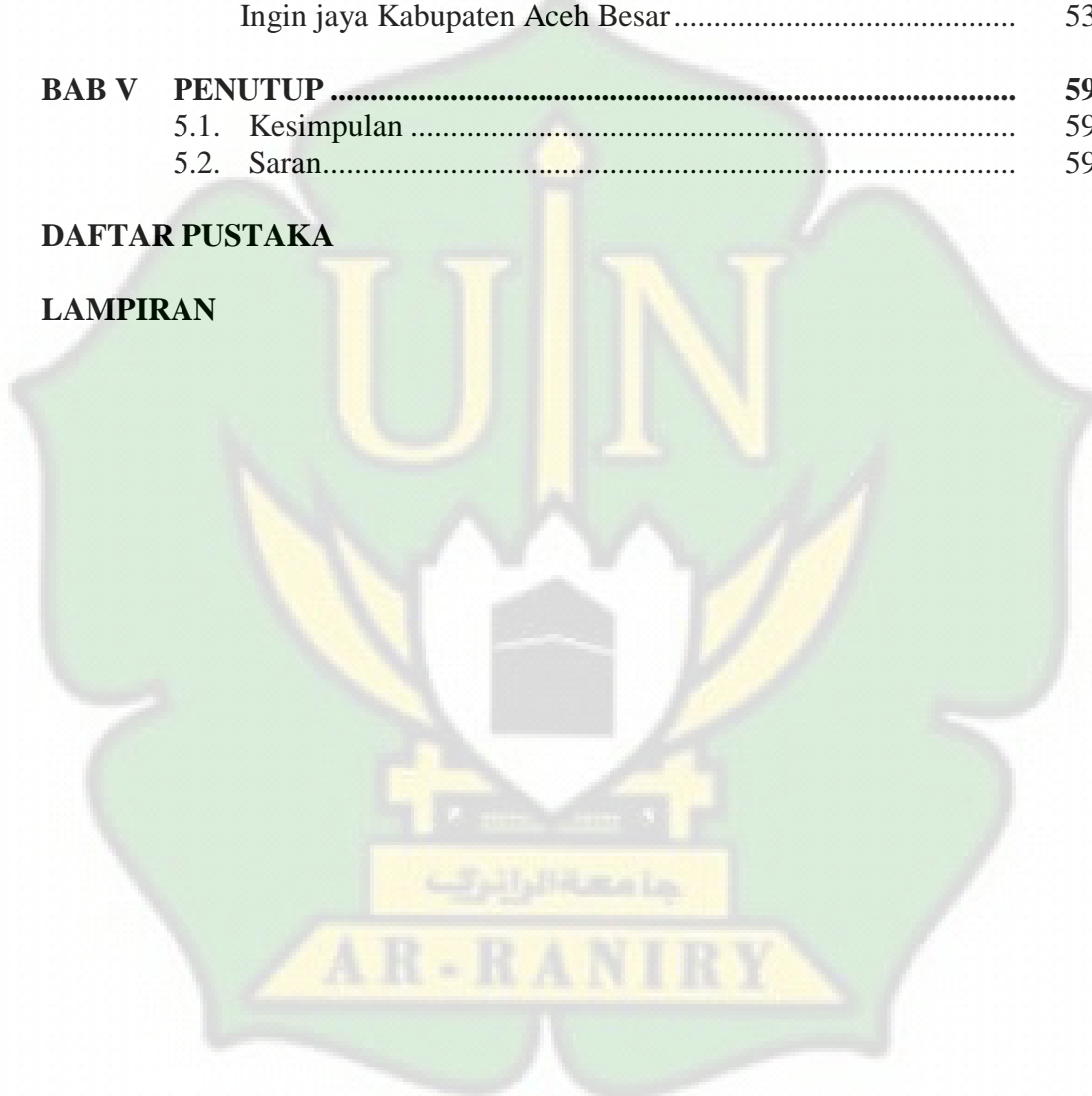
Nadila Sari
NIM. 160802088



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ASBTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	9
1.7. Metode Penelitian.....	10
1.7.1. Jenis Penelitian	11
1.7.2. Lokasi Penelitian	11
1.7.3. Jenis dan Sumber Data	12
1.7.4. Informan Penelitian	13
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.6. Teknik Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2. Kebijakan Publik.....	21
2.2.1. Tahapan Kebijakan Publik	22
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	25
2.3.1. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan.....	26
2.3.2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	27
2.4. Kebijakan Implementasi PKH.....	28
2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan	28
2.4.2. Tujuan Program Keluarga Harapan	30
2.4.3. Sasaran Program Keluarga Harapan	32
2.4.4. Pendamping PKH	34
2.5. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
3.1.1. Sejarah Gampong Bada	37
3.1.2. Letak Geografis	37
3.1.3. Kondisi Geografis dan Kependudukan.....	38

3.1.4. Kondisi Pemerintahan Gampong Bada	40
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	42
4.1. Implementasi Pelaksanaan PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	42
4.1.1. Indikator Pencapaian PKH	43
4.1.2. Instrumen Pelaksana PKH.....	50
4.1.3. KPM Program Keluarga Harapan	52
4.2. Hambatan Implementasi PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	53
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2020.....	2
Tabel 1.2	Informan Penelitian.....	13
Tabel 3.1	Batas Wilayah Gampong.....	37
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Gampong Bada Tahun 2020.....	37
Tabel 3.3	Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	38
Tabel 3.4	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Bada	38
Tabel 4.1	Data penerima PKH di Gampong Bada	50



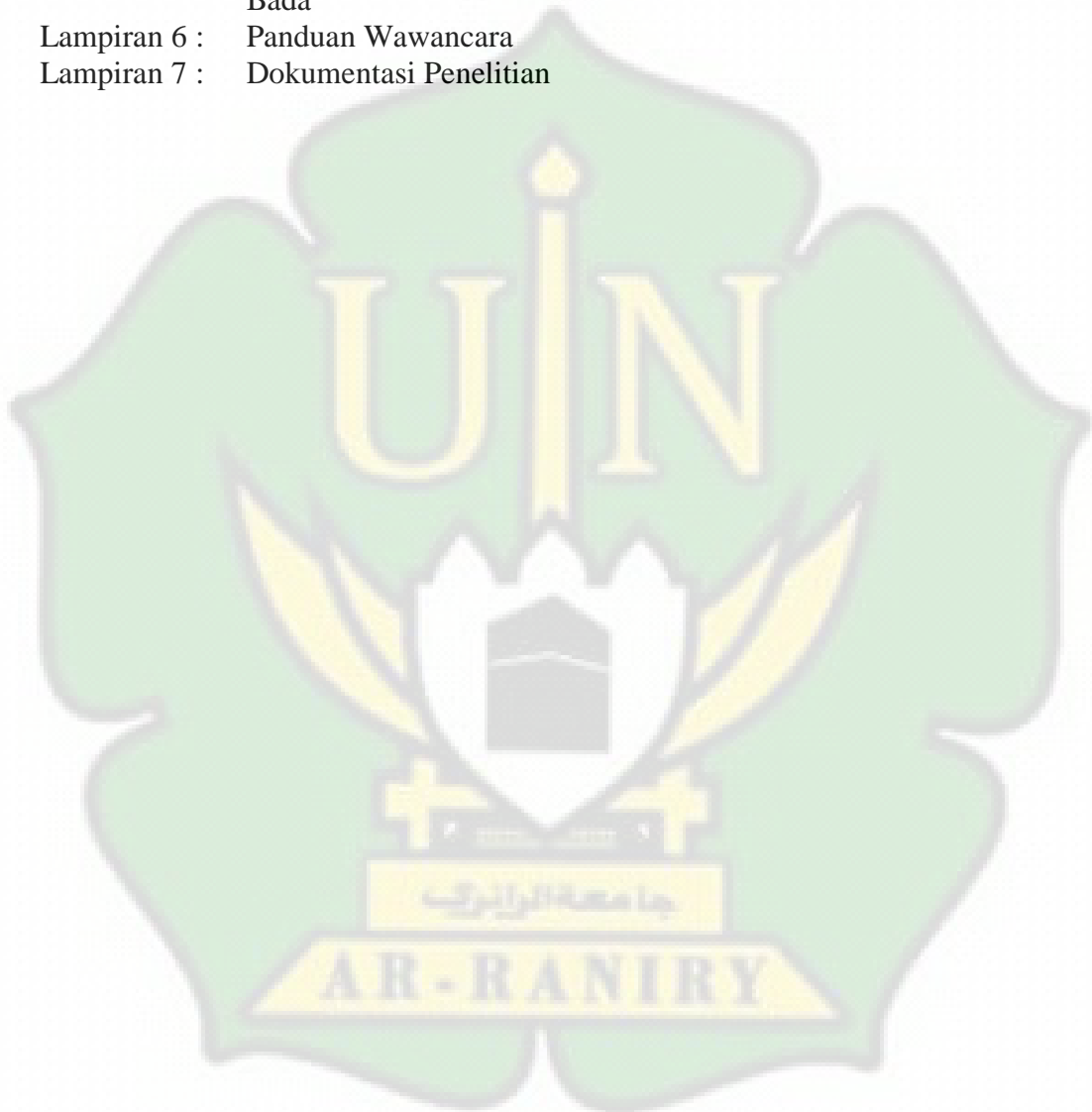
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.1	Struktur Pemerintah Gampong Bada	40
Gambar 4.1	Kartu PKH.....	49
Gambar 4.2	Kartu Sembako PKH.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Gampong Bada
- Lampiran 2 : Nama-nama KPM PKH Gampong Bada
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Gampong Bada
- Lampiran 6 : Panduan Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama di setiap provinsi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju.¹

Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan dan gizi. Dengan kondisi tersebut, maka negara harus melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat miskin, merupakan tanggung jawab Negara Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Dalam melaksanakan kewajiban negara, maka pemerintah Indonesia perlu membuat suatu kebijakan atau program nasional dalam menanggulangi masalah kemiskinan.²

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 di Indonesia yaitu 10,14% atau 27,54 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia.³ Saat ini provinsi Aceh masih tergolong sebagai provinsi miskin di Indonesia,

¹ <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91331> diakses tanggal 21 November 2020

² <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> di akses pada tanggal 20 November 2020

³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> di akses 18 Desember 2021

ditingkat nasional Aceh berada di urutan ke-lima termiskin. Data pada bulan Maret 2021 BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang (15,33%), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang.⁴

Berdasarkan hasil Publikasi BPS, diperoleh data sebagai berikut:⁵

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020
1	Simeulue	18,99%	18,49%
2	Aceh Singkil	20,78%	20,20%
3	Aceh Selatan	13,09%	12,87%
4	Aceh Tenggara	13,43%	13,21%
5	Aceh Timur	14,47%	14,08%
6	Aceh Tengah	15,50%	15,08%
7	Aceh Barat	18,79%	18,34%
8	Aceh Besar	13,92%	13,84%
9	Pidie	19,46%	19,23%
10	Bireuen	13,56%	13,06%
11	Aceh Utara	17,39%	17,02%
12	Aceh Barat Daya	16,26%	15,93%
13	Gayo Lues	19,87%	19,32%
14	Aceh Tamiang	13,38%	13,08%
15	Nagan Raya	17,97%	17,70%
16	Aceh Jaya	13,36%	12,87%
17	Bener Meriah	19,30%	18,89%
18	Pidie Jaya	19,31%	19,19%
19	Kota Banda Aceh	7,22%	6,90%
20	Kota Sabang	15,60%	14,94%
21	Kota Langsa	10,56%	10,44%
22	Kota Lhokseumawe	11,18%	10,80%
23	Kota Subulussalam	17,95%	17,60%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi, 2020

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Profil Kemiskinan di Aceh. 2021. Hal- 4

⁵ *Data kemiskinan provinsi aceh tahun 2005-2019*

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/10/225/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah-perkotaan-perdesaan-provinsi-aceh-tahun-2005-2019.html> diakses pada 20 November 2020

Berdasarkan data BPS di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar masih termasuk dalam Kabupaten miskin, masih banyaknya penduduk yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan menurut Bappenas adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁶ Menurut World Bank definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Adapun menurut BPS dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non-makanan).⁷

Untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah membuat kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dengan harapan program ini mampu menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat rumah tangga miskin. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana

⁶ Definisi kemiskinan menurut Bappenas, <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf> diakses pada 20 November 2020.

⁷ Definisi kemiskinan menurut world Bank, diakses di <https://documents.worldbank.org/curated/en/897131468038955494/pdf/373490v10revis1100PA0Report0English.pdf>. diakses pada 20 November 2020

dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH), PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan masyarakat.⁸

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*. Pelaksanaan PKH di pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, sedangkan PKH di Kabupaten/Kota terdiri dari: pengarah, ketua, koordinator Kabupaten/Kota, pendamping dan operator.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2019 masih sebesar 9,41% dari total penduduk atau 25,14 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7% sampai 8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui dan anak balita, anak berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia pedoman pelaksanaan bimbingan teknis penerima berkelanjutan PKH tahun 2019. hlm 1.

Komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia 70 (tujuh puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.⁹

Menurut *World Bank* Negara yang telah berhasil menekan angka kemiskinan dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) yaitu Negara Mexico, Brazil, dan Filipina, ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sedangkan untuk di Indonesia program PKH mulai dilaksanakan pemerintah di Indonesia sendiri program PKH mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Provinsi Aceh sampai Juli 2020 penerima bantuan PKH berjumlah 267.693 KPM jumlah ini tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, daerah paling banyak adalah Kabupaten Aceh Utara 41.497 KPM, kemudian Pidie 35.109, Aceh Timur 21.343 KPM, Aceh Besar 20.913 KPM dan Banda Aceh 4.645 KPM. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di Aceh Besar mencapai 20.913 yang tersebar dalam 23 kecamatan, KPM-PKH terbanyak dari Kecamatan Indrapuri mencapai 1.802 dan Kecamatan Darul Imarah berada di urutan kedua yaitu sebanyak 1.580 KPM, maka kehadiran PKH sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.¹⁰

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim dan 604 Gampong/Desa. Luas Wilayah kabupaten Aceh Besar adalah 2.903.50 km², sebagian besar berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Tahun

⁹ <https://kemosos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses pada 23 Juni 2019

¹⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/03/37-keluarga-keluar-dari-daftar-pkh#:~:text=Dijelakkan%20Hingga%20posisi%20juli%202020,tersebar%20seluruh%20kabupaten%20kota>. Diakses 02 Februari 2021

2020 lalu, Angka kemiskinan di Aceh Besar sebesar 13,84% ditargetkan turun sebesar 2,84% di tahun 2021 ini.¹¹

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, dengan luas 24,34 km² terdiri dari 6 mukim dan 50 Gampong/Desa, dengan jumlah penduduk 33.290 jiwa. Dimana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang.¹²

Berdasarkan data di atas, bahwa Gampong Bada adalah salah satu gampong di Kecamatan Ingin Jaya dan PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2012, dengan jumlah 7 KPM dan tahun 2017 sebanyak 13 KPM. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa uang, dan sembako sejak tahun 2019. Adapun kegiatan PKH di gampong Bada yaitu mengadakan pertemuan dan diskusi rutin dalam waktu sebulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH. Selain itu, penyaluran bantuan berupa sembako diberikan kepada PKM-PKH tiap awal bulan atau sebulan sekali. Penerima bantuan dapat mengambil sendiri sembako di toko-toko yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kartu sembako PKH. Untuk penyaluran bantuan berupa uang, disalurkan 3 bulan sekali dalam setahun disalurkan ke rekening penerima bantuan berupa kartu ATM PKH.¹³

Dari hasil observasi awal peneliti dengan pendamping PKH gampong Bada untuk saat ini, Ibu Uswatun Hasanah mendampingi 8 gampong di Kecamatan Ingin Jaya, dari 8 gampong yang didampingi ada KPM-PKH yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan namun tidak melapor kepada pendamping, padahal penerima bantuan tersebut sudah termasuk keluarga mampu.

¹¹ <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/08/aceh-besar-target-kemiskinan-turun-284-persen-paling-tinggi-dari-seluruh-kabupatenkota> di akses 18 Desember 2021

¹² Badan Pusat Statistik Aceh Besar. Kecamatan ingin jaya dalam Angka. 2021. Hal 26

¹³ Wawancara dengan Pendamping PKH Kec. Ingin Jaya. Uswatun Hasanah. 2021.

Hal ini diketahui pada saat penempelan stiker di rumah-rumah penerima bantuan PKH. Menindaklanjuti hal tersebut, pendamping PKH harus segera melakukan pemutakhiran data atau pendataan terbaru bagi para KPM-PKH yang sudah tidak layak lagi menerima, serta mengkoordinasikan ke pihak terkait untuk segera dikeluarkan dari program, bagi yang sudah melaporkan bahwa sudah tidak layak lagi untuk menerima PKH.¹⁴

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yaitu dimana penerima manfaat PKH menolak untuk dilakukannya Graduasi atau pelepasan sebagai penerima PKH. Pendamping PKH dalam hal ini berembug dengan pihak terkait seperti Keuchik Gampong Bada dan perangkat Gampong lainnya untuk menyelesaikan konflik ini untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang berkaitan dengan implementasi bantuan PKH bahwa di Gampong Bada saat ini penerima bantuan Gampong Bada berjumlah 20 orang yang menerima bantuan terdapat beberapa nama-nama masyarakat yang tergolong keluarga mampu namun mendapatkan bantuan PKH. Permasalahan lainnya adalah adanya penerima PKH yang sudah masuk kategori menjadi keluarga mampu dan masih menjadi penerima manfaat PKH namun tidak mengundurkan diri. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fenomena di lapangan menunjukkan pelaksanaan PKH ini masih belum tepat sasaran, sedangkan tujuan program PKH adalah mengatasi masalah kemiskinan, implementasi PKH diharapkan lebih optimal sehingga tujuan dari program ini dapat terwujud.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Bantuan Program Keluarga**

¹⁴. observasi awal dengan pendamping PKH Gampong Bada Uswatun Hasanah. 4 Februari 2021

Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Melihat bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Melihat apa kendala dan hambatan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa sajakah kendala dan hambatan dalam penyaluran PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Apa kendala dan hambatan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian ilmu pemerintahan terutama mengenai implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin.
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.
4. *Conditional Cash Transfer* (CCT) adalah bantuan tunai bersyarat, program pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran.
5. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.
6. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar.

7. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN.
8. Mengemuka adalah suatu cara untuk menyampaikan pendapat ke publik.
9. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.
11. Program adalah daftar terinci mengenai usaha yang akan dilaksanakan.
12. Kesejahteraan adalah keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat dan damai.
13. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat atau menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
14. Kronis adalah kondisi yang bersifat menahun dan berlangsung dalam waktu yang lama.
15. World Bank merupakan lembaga keuangan internasional.
16. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

17. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

1.7. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan data dengan cara mengumpulkan, menjangring, serta mengolah data atau informasi untuk dipelajari dan dianalisis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan metode menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informal, serta metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penggambaran atas suatu fenomena atau masalah sesuai dengan data dan fakta yang ada. Alasannya karena penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁵

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia atau perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan kapan dan di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih gampong Bada sebagai lokasi penelitian karena ditemukan permasalahan terkait dengan implementasi bantuan PKH di gampong ini yang peneliti ketahui dari hasil observasi maupun wawancara di lapangan, dimana terdapat beberapa keluarga mampu yang menjadi KPM-PKH, dan di lokasi yang sama peneliti juga menemukan KPM-PKH yang sudah menjadi kategori keluarga mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari kepesertaan KPM-PKH.

Di Gampong Bada ini sebagian masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata pencahariannya sebagai buruh harian dan bertani, dimana dari hasil penghasilan tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa dikatakan layak. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian di gampong Bada.

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa

interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Adapun data-data yang dikumpulkan bersumber dari:

1. Data Primer:

Yaitu informan terdiri dari masyarakat yang menerima bantuan PKH, Pedamping PKH dan Keuchik Gampong Bada, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH dan Pedamping PKH sebagai sampel sumber data, dengan bantuan alat diantaranya adalah alat perekam, alat dokumentasi (kamera) dan alat tulis.

2. Data Sekunder

Yaitu Data yang diperoleh dari dokumen, buku buku, jurnal penelitian atau sumber resmi yang berkaitan dengan materi penelitian.

1.7.4. Informan Penelitian

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Masyarakat Penerima Bantuan PKH	4 Orang	1. Keluarga yang tergolong sudah mampu tapi belum digraduasi. 2. Penerima PKH di jenjang pendidikan 3. Penerima PKH golongan lansia 4. Penerima PKH Ibu Hamil
2.	Pedamping PKH Gampong Bada	1 Orang	Selaku yang menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH

3.	Keuchik Gampong Bada	1 Orang	Selaku koordinator antara warga dengan pendamping PKH
Jumlah		6 Orang	

Sumber: Olahan data peneliti:2021

Proses penentuan Informan KPM dipilih berdasarkan data penerima PKH tahap I dan tahap II dimana masing-masing tahap jumlah KPM nya tidak sama, adapun data yang dimaksud sebagai berikut, tahap I terdapat 7 KPM dan Tahap II terdapat 12 KPM. Untuk informan PKM PKH pertama adalah keluarga yang tergolong sudah mampu tapi belum digraduasi, selanjutnya informan kedua berdasarkan jenis penerima PKH yang menerima PKH di jenjang pendidikan, informan ketiga untuk PKH golongan lansia dan yang terakhir adalah ibu hamil. Selain itu, juga mewawancarai Pendamping PKH Gampong Bada, selaku yang menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Selanjutnya kami juga mewawancarai keuchik gampong Bada, selaku koordinator yang memastikan informasi diterima dengan baik dan benar oleh warga dengan pendamping PKH. Berdasarkan data tersebut, menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi bantuan PKH dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dari wawancara langsung bisa bervariasi jawabannya, sehingga data yang didapat tepat dan sesuai realita yang terjadi di lapangan karena diperoleh dari berbagai kalangan penerima manfaat PKH.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui:

1. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoretis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.¹⁶

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan PKH serta kesesuaian penerima PKH dengan kondisi di lapangan dengan ketentuan yang berlaku di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm 63.

adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai PKM-PKH yang berjumlah 4 orang, Pendamping PKH dan Keuchik dan Tuha Peut gampong Bada. Agar penelitian lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara dengan informan untuk keperluan pengolahan data.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada.¹⁸

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), paparan atau sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

¹⁷ *Pengertian Wawancara* [https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancaramendalam/#:~:text=Pengertian%20wawancara%2Dmendalam%20\(In%2D,dimana%20pewawancara%20dan%20informan%20terlibat](https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancaramendalam/#:~:text=Pengertian%20wawancara%2Dmendalam%20(In%2D,dimana%20pewawancara%20dan%20informan%20terlibat) diakses pada 10 juni 2020

¹⁸ Satori dan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 133-146

1. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan yang penting, membuat kategori, pemusatan perhatian pada penyederhanaan membuang yang tidak dipakai, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan cara membuat ringkasan, reduksi data merupakan proses berfikir sensitive dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan cenderung dilakukan dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum yang dirumuskan kembali agar lebih terperinci dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses peneliti yang diawali dengan

mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut, pengembangan data yang diperoleh kemudian diolah dan membuat pola penarikan kesimpulan yang kemudian akan digunakan sebagai hasil akhir. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.¹⁹



¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 389-343

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri Hardianto, Carmia Diahloka, dengan Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis kualitatif, lokasi penelitian di kecamatan Lowokwaru, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi lapangan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi PKH di kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik sampai sekarang, dapat dilihat dengan adanya peningkatan status pendidikan dan mengurangi anak anak yang putus Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khodziah Ismail Kholif, Irwan Noor, Dan Siwidiyanto, dengan Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil, tidak

²⁰ Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, dan Carmia Diahloka. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, jurnal S1 ilmu social dan ilmu politik universitas Tribhuwana Tungadewi tahun 2014.

semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan dari pelaksanaan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal.²¹

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial (Togiaratua Nainggolan dkk) pada tahun 2012 yang berjudul : Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di 7 Provinsi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sebagai metode pelengkap, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perberbedaan yang signifikan antara kondisi RTSM sebelum PKH dan sesudah PKH, kondisi sesudah PKH lebih baik dari pada kondisi sebelum PKH, uang dapat dibelanjakan untuk membeli makanan yang berkualitas lebih baik dari pada sebelumnya serta obat obatan yang diperlukan. RTSM dapat menginvestasikan uangnya dalam aset material dan perlengkapan seperti kulkas, yang mengurangi peluang anak terpapar inveksi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan. Secara umum PKH telah berdampak positif bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).²²

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaan tersebut terdapat pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan serta di rumusan masalah terdapat kesamaan yaitu implementasi program di penelitian terdahulu yang pertama, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian, perbedaan

²¹ Khodziah Ismail Kholif, Irwan Noor, Dan Siwidiyanto. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, jurnal s1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.

²² Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si dkk, PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI INDONESIA: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di 7 Provinsi. Jurnal penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial tahun 2012.

selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian terdahulu yang kedua dan ketiga berbeda dengan penelitian ini.

2.2. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam suatu kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan public (*public*

policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara terpaksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:²³

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan proses yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar para ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” artinya kebijakan

²³ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014) hlm 3-7.

publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.²⁴ Dalam kebijakan publik ada beberapa proses atau tahapan.

2.2.1. Tahapan kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks kerana melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan konsumen dalam mengkaji kebijakan publik.²⁵ Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.²⁶

Tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu public yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan

²⁴ Suharto Edi, *kebijakan social sebagai kebijakan publik*, (Bandung: alfabeta, 2013), Hal 3.

²⁵ Winarno Budi, *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*,(Yogyakarta:Media Pressindo,2007) hlm 32

²⁶ Subarsono AG, *Analisi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2016) hlm 8.

(*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tadi yang didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari sebagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu proses masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.²⁷ Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

²⁷ B. Sore Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV . Sah Media 2017), hlm 36-37.

4. Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaku pelaksana.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.²⁸

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan tindakan pemerintahan dalam mengatasi

²⁸ Winarno Budi, *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*,(Yogyakarta:Media Pressindo,2007) hlm 34.

masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap.²⁹

Implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn merupakan “tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Tindakan-tindakan yang dimaksud berupa usaha yang dilakukan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.³⁰

2.3.1. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik suprastruktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan. *Faktor pertama*, yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Kebijakan timbul dari sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan antarorganisasi dan karakteristik implementasi, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan. *Faktor kedua* yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah hubungan inter-organisasi. Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi dari berbagai

²⁹ Hayat dkk, *Reformasi Kebijakan Publik perspektif makro dan mikro*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2018), hal 58.

³⁰ Winarno Budi, *Kebijakan Publik:Teori, proses dan Studi kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm 149.

organisasi pada tingkatan yang berbeda, kegiatan pemerintah daerah, maupun pusat serta organisasi non-pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. *Faktor ketiga*, adalah sumber daya untuk implementasi program, lingkungan yang kondusif dan efektivitas organisasi merupakan bagian penting dalam sumber daya ini adalah ketersediaan dana, administrasi teknis juga determinasi pengeluaran efek dari program desentralisasi. *Faktor keempat*, adalah karakteristik implementator yang menentukan determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan. Secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin dan mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat dengan perencanaan dinas atau instansi sektoral, akan tetapi yang diperoleh dari gambaran bahwa implementasi perencanaan pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep kebijakan yang dikembangkan pemerintah.³¹

2.3.2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

³¹*Ibid*, 58-59

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implentasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.³²

³² Drs. AG Subarsono, M.Si, MA. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2016) Hal. 90-92.

2.4. Kebijakan Implementasi Program Keluarga Harapan

2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.³³

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai data calon peserta yang akan di validasi oleh pelaksana PKH didaerah. Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut:

Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil sesuai dengan

³³.Dedy utomo dkk, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin".Jurnal Administrasi Public vol.2, no. 1, 2013 hal 31.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Menurut Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan empat tingkat pencapaian.³⁴

1. Tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
2. Tepat jumlah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan pemerintah.
3. Tepat guna adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untyuk keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Tepat waktu adalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2.4.2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan dalam masyarakat. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan definisi kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan diatas adalah definisi kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang diperbaharui dalam UU No. 11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Fahrudin adalah sebagai berikut:

³⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2020.

Menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi diatas menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan yang bertujuan dengan pelayanan untuk individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

Berdasarkan perpres Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. PKH termasuk dalam salah satu program tersebut. Yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.³⁵

2.4.3. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Adapun indikator kemiskinan menurut Kemensos PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) adalah sebagai berikut.³⁶

1. Pangan
 - a. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau sungai atau hujan.
 - b. Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
 - c. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu.

³⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman pelaksanaan PKH tahun 2019 Hal 25-26

³⁶ Indikator kemiskinan menurut Kemensos (Pendataan Program Perlindungan Sosial) <https://www.pkhjepara.com/mengukur-kemiskinan/> diakses 10 mei 2021

d. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

2. Papan

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.

b. Jenis lantai terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murah.

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.

e. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.

3. Sandang

a. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

4. Kebutuhan Dasar Lainnya

a. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.³⁷

Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Dalam menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa hal yaitu:

a. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1. Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.

³⁷ ibid

2. Perlindungan dan jaminan sosial adaptif bagi keluarga yang terkena dampak bencana.

b. Usulan Daerah

Daerah membuat usulan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
2. Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH kab/kota.
3. Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di kecamatan.

Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

2.4.4. Pendamping PKH

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH. Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut:

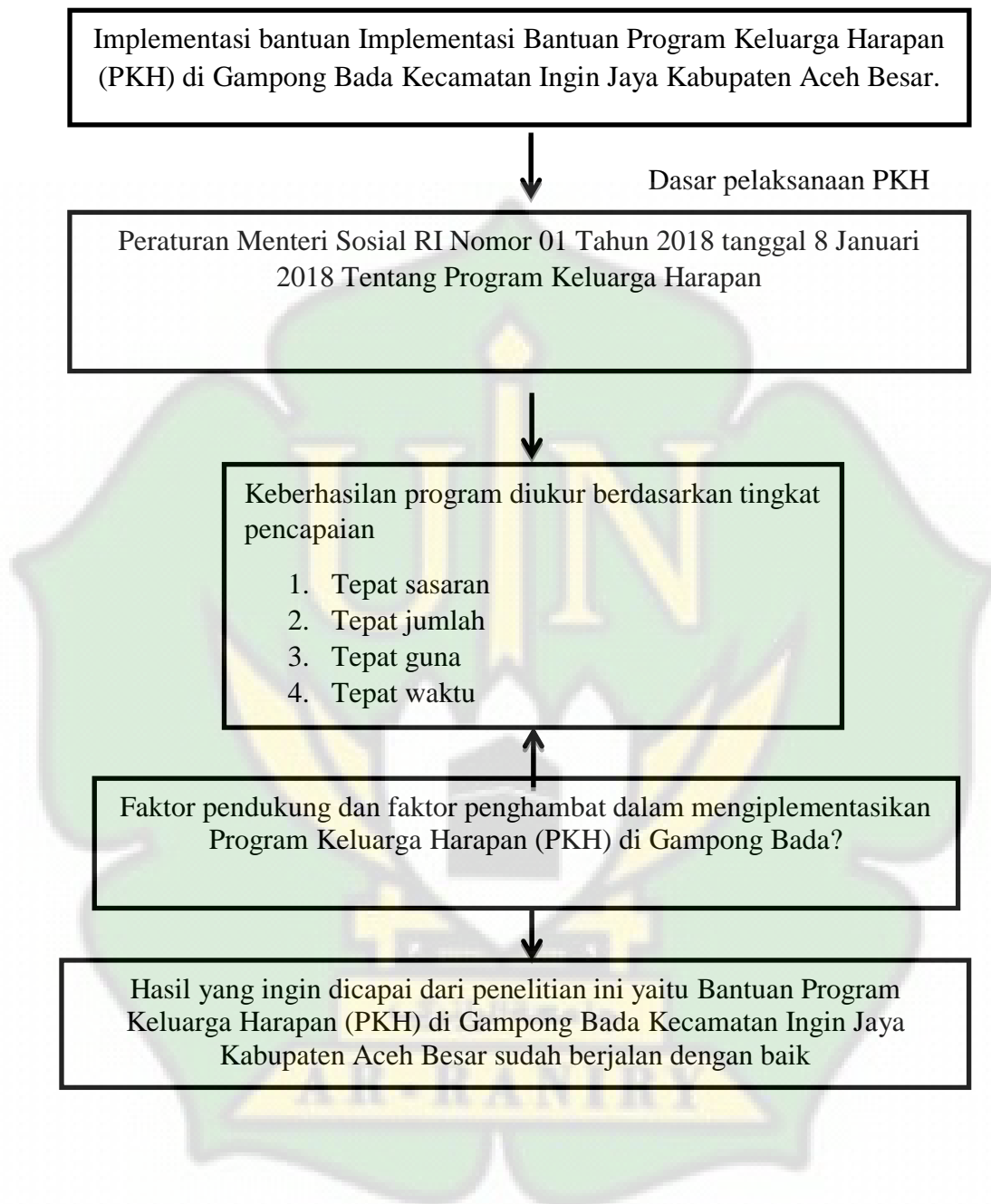
1. Pendamping Sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampungannya setiap bulan;
2. Pendamping Sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran;

3. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
4. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampungannya. Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH. Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing KPM;
2. Pembagian dan pembentukan kelompok KPM dengan masing masing beranggotakan 10 hingga 30 KPM, dengan kriteria:
 - a) pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal KPM;
 - b) jika memungkinkan, pembentukan kelompok didasarkan pada jenis/tujuan tertentu, seperti: kelompok usaha/ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
3. Menentukan tujuan kelompok;
4. Menentukan/memilih pengurus kelompok;
5. Mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok;
6. Menentukan kebutuhan administrasi kelompok

2.5. Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Gampong Bada

Asal usul berdirinya Gampong Bada berdasarkan cerita tetua di gampong ini menyebutkan penamaan Gampong Bada diambil dari sebuah makanan ringan yaitu pisang goreng atau dalam bahasa Aceh disebut Bada, versi lainnya menyebutkan bahwa di gampong ini dulunya banyak ditanami pohon pisang dengan berbagai jenis sehingga penduduk gampong ini sering membuat makanan ringan pisang goreng atau Bada dalam bahasa Aceh, maka diambillah kata Bada sebagai nama gampong.

Gampong Bada adalah gampong yang ada di Mukim Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Gampong ini berjarak 1,4 Km dari pusat kecamatan Ingin Jaya. Luas wilayah Gampong Bada adalah 0,47 Ha, yang terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Meunasah Ampeh, Teungku Dilangga dan Tumpok Teungoh. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020 jumlah penduduk 473 jiwa.

3.1.2. Letak Geografis

Berdasarkan Tabel 3.1, secara administrasi dapat dilihat batas wilayah Gampong Bada sebagai berikut:

a. Batas Wilayah Gampong

Tabel 3.1 : Batas Wilayah Gampong

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan Gampong
1	Sebelah Utara	Gampong Siron
2	Sebelah Timur	Gampong Pasie Lamgarot
3	Sebelah Barat	Sungai Krueng Aceh
4	Sebelah Selatan	Gampong Pasie Lamgarot

Sumber: Profil gampong Bada 2020

b. Orbital (jarak dari pusat pemerintahan Gampong

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1,4 km
2. Jarak dari ibu kota kabupaten : 52 km
3. Jarak dari ibu kota Banda Aceh : 6,8 km

3.1.3. Kondisi Demografis Dan Kependudukan**1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Gampong Bada sebanyak 437 jiwa, yang tersebar di 3 wilayah dusun di Gampong tersebut, dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Gampong Bada tahun 2020

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Lk	Pr	
1	Meunasah Ampeh	59	96	89	185
2	Teungku Dilangga	45	74	57	131
3	Tumpok Teungoh	51	92	65	157
Total		155	262	211	473

Sumber: profil Gampong Bada 2020

2. Pendidikan

Tingkat jenjang pendidikan masyarakat Gampong Bada berdasarkan data dapat dilihat ada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Sekolah	Jumlah
1	TK	14
2	SD/Sederajat	63
3	SLTP/Sederajat	33
4	SLTA/Sederajat	23
5	Dayah	10
6	D-1	-
7	D-2	-
8	D-3	3
9	S-1	21
10	S-2	1
11	S-3	1
JUMLAH		169

Sumber: profil gampong bada 2020

3. Perekonomian Gampong

Secara umum mata pencaharian masyarakat di Gampong Bada sebagai petani padi, peternak dan sebagian lainnya tersebar ke beberapa bidang pekerjaan seperti : pedagang, wiraswasta, PNS/TNI/POLRI, tukang kayu, Tukang Batu, sopir, dosen, buruh bangunan, dll. Pada umumnya masyarakat yang bekerja sebagai petani padi dan peternak memiliki mata pencarian lainnya karena menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh cuaca, musim, hama dan waktu yang lama.

Tabel 3.4 jenis mata pencarian Masyarakat Gampong Bada

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Petani padi	45
2	Peternak	30
3	Pedagang	10
4	Wiraswasta	27
5	PNS/TNI/POLRI	15
6	Tukang kayu	4
7	Tukang batu	2
8	Sopir	4
9	Dosen	2
10	Buruh bangunan	7

Sumber : profil Gampong Bada 2020

Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Gampong Bada berkerja sebagai petani padi dan peternak.

4. Keadaan Sosial

Hubungan sosial antara masyarakat di Gampong bada masih terjalin baik, dimana kegiatan-kegiatan sosial masih berjalan dan dipelihara hingga saat ini, dan sangat ditekankan untuk saling tolong menolong antar sesama warga Gampong jika ada yang sedang ditimpa musibah. Bahasa yang digunakan masyarakat Gampong Bada adalah bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, namun sebagian besar masyarakat lebih fasih menggunakan bahasa Aceh dikarenakan dalam kehidupan sehari hari mereka lebih sering menggunakan bahasa Aceh.

Adapun kegiatan sosial Gampong Bada yang sering dilakukan adalah:

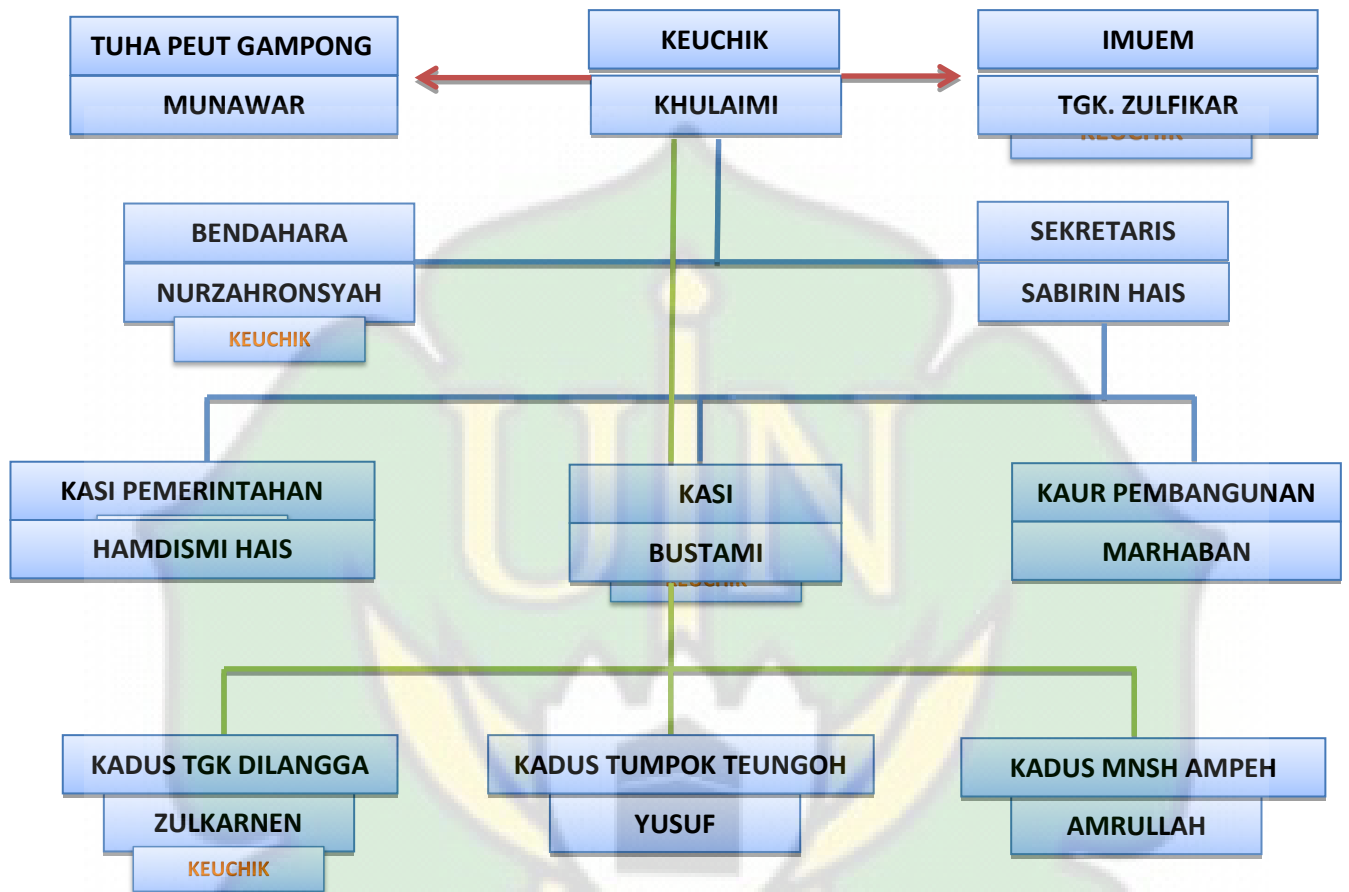
1. Gotong royong bersama
2. Kegiatan PKK
3. Posyandu
4. Wirid
5. Pengajian rutin malam selasa
6. Takziah ke tempat orang meninggal
7. Kunjungan ke tempat orang sakit
8. Dalail khairat tiap malam jumat

3.1.4. Kondisi Pemerintahan Gampong Bada

Gampong Bada telah beberapa kali mengalami pergantian aparatur baik di tingkat Keuchik maupun tingkat lainnya, untuk saat ini Gampong Bada dipimpin oleh seorang Keuchik, 1 sekretaris, 2 Kasi dan beberapa perangkat Gampong lainnya yang ikut membantu pemerintahan Gampong. Gampong Bada terbagi 3

dusun yaitu dusun Meunasah Ampeh, dusun Tumpok Teungoh dan dusun Tgk Dilangga.

Gambar 3.1 STRUKTUR PEMERINTAH GAMPONG BADA



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Implementasi Pelaksanaan PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dimulai sejak 2012 yaitu dengan jumlah 7 KPM (keluarga penerima manfaat). Lalu ditahun 2017 bertambah 13 KPM. Tujuan dari pelaksanaan PKH sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada keluarga penerima manfaat di desa gampong Bada. Menurut Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan empat tingkat pencapaian.³⁸

³⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). 2020. Hal 1

5. Tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
6. Tepat jumlah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan pemerintah.
7. Tepat guna adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untyuk keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
8. Tepat waktu adalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

4.1.1. Indikator Pencapaian PKH

Keberhasilan Suatu PKH di suatu daerah harus memenuhi empat pencapaian. Berdasarkan data lapangan dari gampong Bada Kecamatan Ingin jaya Kabupaten Aceh Besar diperoleh data sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan Fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Berikut pandangan mengenai ketetapan sasaran yang diketahui oleh informan yang mewakili jajaran pelaksanaan PKH. Pendataan penerima PKH dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang diperoleh dari Pemerintah dan Non Basis Data Terpadu (Non BDT) dari hasil survey yang dilakukan langsung oleh Tim Pedamping PKH Kecamatan, berikut kutipan wawancara

dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku pendamping PKH Gampong Bada yang mengatakan bahwa PKH Gampong Bada sudah tepat sasaran :

“Selama ini pelaksanaan PKH di Gampong Bada saya rasa sudah tepat sasaran. Karena data PKH juga didapat dari data BDT dan kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Dimana data itu nanti akan kita validasi ke lapangan. Biasanya warga kita kumpulkan di meunasah setempat dengan bantuan perangkat desa dalam hal ini pak geuchik atau perangkat desa lainnya untuk menyebarkan undangan kepada warga penerima PKH. Kemudian di Validasi apakah warga tersebut sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah, yaitu ibu hamil, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas, apabila nanti ada yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan maka akan di graduasi dengan pemberian bantuan alat usaha seperti mesin jahit dan bantuan modal usaha lainnya”³⁹

Hasil wawancara dengan pak Geuchik Gampong Bada juga menyatakan hal yang sama, bahwa KPM PKH Gampong Bada Sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah dan sudah tepat sasaran:

“Sudah. Menurut saya, PKH di Gampong Bada sudah sesuai dengan kriteria yang diterapkan. KPM PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena ada peninjauan langsung dari petugas yang datang ke rumah langsung, saya juga ikut mendampingi. Jadi melihat kondisi rumah juga waktu tahun 2013 dan 2017 itu. Jadi pasti tepat sasaran, karena ada survey lapangan juga oleh petugas PKHnya”⁴⁰

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh penerima PKH Gampong Bada, yaitu Ibu Yusnita menurutnya PKH Gampong Bada sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

³⁹ Wawancara dengan Pendamping PKH Gampong Bada Ibu Uswatun Hasanah, Tanggal 22 Desember 2021.

⁴⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Bada, Pada Tanggal 23 Desember 2021

“Sudah tepat, karena saya memang kurang mampu, dan dengan adanya bantuan PKH ini sangat membantu memperbaiki keadaan ekonomi kami sehari-hari”⁴¹

Wawancara dengan Ibu Nina Aswita juga menyampaikan bahwa penerima PKH sudah sesuai dengan kriteria dari Pemerintah, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau menurut saya penerima PKH di Gampong Bada sudah tepat sasaran, kan yang dapat bantuan PKH warga yang kurang mampu, dan dengan adanya bantuan PKH ini kami merasa sangat terbantu dari segi ekonomi”⁴²

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan pelaksanaan PKH di Gampong Bada sudah tepat sasaran. Meskipun tepat sasaran, dalam kenyataannya ada KPM yang tidak layak menerima atau sudah mapan/sudah berkecukupan, masih dalam proses dikeluarkan dan masih menerima PKH tetapi sudah diajukan untuk dikeluarkan, menunggu verifikasi.

2. Tepat Jumlah

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.⁴³ Perlu diketahui, bahwa bansos PKH hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang sesuai kategori penerima PKH menurut Kementerian Sosial.

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Yusnita, Selaku KPM PKH Gampong Bada, Pada Tanggal 21 Desember 2021

⁴² Wawancara Dengan Ibu Nina Aswita, Selaku KPM PKH Gampong Bada, Pada Tanggal 21 Desember 2021

⁴³ Pedoman Umum Program keluarga Harapan (PKH). 2021

Adapun besaran bantuan PKH per tahun 2021 yang diberikan adalah sejumlah: Ibu Hamil/Nifas menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Anak Usia Dini 0 sd 6 Tahun menerima sebesar Rp3.000.000 per tahun. Pendidikan Anak SD/Sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun. Pendidikan Anak SMP/Sederajat menerima sebesar Rp1.500.000 per tahun. Pendidikan Anak SMA/Sederajat menerima sebesar Rp2.000.000 per tahun. Penyandang Disabilitas berat menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun.

Di bawah ini uraian wawancara penerima PKH di Gampong Bada. Yaitu Ibu Yusnita menjelaskan :

“Selama mendapatkan PKH jumlahnya selalu sama. Begitu dana keluar saya langsung menuju ke ATM BSI. Dan duitnya saya ambil sendiri di ATM.”⁴⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Penerima PKH lainnya dari Gampong Bada, yakni Ibu Fallati :

“Dana PKH yang kami terima di bank selalu sama jumlahnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Pendamping PKH”⁴⁵

Wawancara dengan Ibu Roslaini juga menyampaikan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya;

“saya mendapatkan bantuan PKH dalam setahun 4 kali dan jumlahnya selalu sama”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa selama ini pembagian bantuan PKH sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yusnita Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Fallati Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Roslaini Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

pemotongan dari siapapun dan pihak apapun. Sehingga bisa dikatakan sudah tepat jumlah.

3. Tepat Guna

PKH diberikan untuk keluarga miskin dan digunakan untuk sebagaimana kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Ibu Uswatun Hasanah selaku Pendamping PKH Gampong Bada, Penerima PKH Gampong Bada sudah menggunakan dana PKH dengan Sangat Baik. Menurutnya, dana PKH bisa membantu memenuhi kebutuhan anak sekolah jika komponen anak sekolah. Berikut uraian wawancaranya :

“Saya selaku Pendamping PKH, setiap bulannya selalu melakukan pertemuan dengan warga. Banyak materi yang disampaikan, salah satunya yaitu menggunakan uang PKH dan cara pengelolaannya. Saya memberikan pengetahuan untuk menggunakan uang PKH dengan baik, yaitu untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya untuk anak sekolah misalnya serta perbaikan gizi anak juga, untuk membeli obat bagi lansia ketika sakit, membeli makanan bergizi untuk ibu hamil guna memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi selama ini saya sudah melihat KPM PKH sudah menggunakan uangnya sesuai dengan yang di harapkan pemerintah”⁴⁷

Ibu Nina Aswita selaku KPM PKH Gampong Bada juga mengatakan bahwa Dana PKH sudah digunakan sebagaimana mestinya, sesuai instruksi yang telah disampaikan oleh pendamping PKH setempat. Berikut kutipan wawancaranya :

“Saya menggunakan uang dari bantuan PKH untuk kebutuhan sekolah anak saya, seperti membeli buku sekolah, sepatu dan perlengkapan

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah Selaku Pendamping PKH Gampong Bada
22 Desember 2021

sekolah lainnya. Menggunakan sebijak mungkin dan sesuai arahan ibu pendamping”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan KPM, dapat disimpulkan bahwa PKH sudah tepat guna. Karena KPM menggunakan dananya sesuai dengan arahan dari pendamping PKH dan sesuai dengan harapan pemerintah agar dana digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan yang penting lainnya.

4. Tepat Waktu

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan sekali, Februari, Mei, Agustus dan November.

Menurut Wawancara dengan Pendamping PKH Gampong Bada. Membenarkan hal tersebut, yakni pencairan dana PKH selalu sesuai dengan Ketetapan dari pemerintah. Berikut kutipanya :

“Dana PKH selalu turun tepat waktu selama saya mendampingi, Saya akan memberitahu kepada KPM kalau dana sudah cair. Jadi bisa di ambil di ATM masing-masing dan digunakan sebagaimana mestinya”⁴⁹

Senada dengan pendamping PKH, Ibu Fallati sebagai salah satu KPM PKH Gampong Bada juga membenarkan hal tersebut. Berikut kutipan wawancaranya :

“Bantuan yang saya terima sudah tepat waktu, begitu ibu pendamping memberi kabar dana cair, saya langsung cek rekening ke ATM. Dan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Nina Aswita Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah Selaku Pendamping PKH Gampong Bada 22 Desember 2021

dananya sudah masuk sesuai dengan yang dibilang yaitu 3 bulan sekali”⁵⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Roslaini, bahwa bantuan PKH selalu tepat waktu, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah, bantuan PKH yang saya terima selalu tepat waktu setiap 3 bulan sekali walaupun tanggalnya berbeda-beda tiap bulannya, kadang tanggal 4 kadang tanggal 8 tapi masih dalam bulan yang sama”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dana cair empat kali dalam setahun.

Dalam penetapan KPM PKH di Gampong Bada sudah dilakukan secara objektif, karena tidak ada campur tangan dari pemerintah Gampong untuk memasukkan masyarakat yang sudah mampu sebagai penerima PKH. Data penerima PKH berasal dari data BDT Pemerintah, kemudian dilakukan validasi di Gampong dengan cara menyebarkan undangan untuk mengumpulkan KPM yang disebut dengan pertemuan awal. Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah KPM tersebut benar-benar warga kurang mampu dan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah.

Selain sasaran yang sudah tepat, indikator tepat jumlah dalam PKH di Gampong Bada sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Indikator Tepat Guna pun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah yaitu untuk membantu kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Fallati Selaku KPM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Roslaini Selaku KPM PKH Gampong Bada, Pada Tanggal 21 Desember 2021

Begitu juga dengan indikator tepat waktu yang berjalan baik, waktu pembagian bantuan PKH juga sudah sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah.

Berdasarkan 4 (empat) indikator pencapaian program Program Keluarga Harapan (PKH) di atas bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada dapat diartikan sudah terlaksana dengan baik. Karena sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada sebagian besar sudah tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

4.1.2. Instrumen Pelaksana Program Keluarga Harapan

Kartu PKH merupakan identitas penerima bantuan yang terintegrasi dengan fasilitas ATM melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia yang memiliki jaringan luas di kabupaten Aceh Besar. Pada Program PKH ini ada dua jenis kartu, yang pertama adalah Kartu PKH yang menerima Bantuan berupa Bentuk uang yang dibagi ke dalam 4 tahap dalam setahun. Kartu kedua dikhususkan untuk penerima bantuan uang pengganti sembako yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.



Gambar. 4.1. Kartu PKH

Adapun penggunaan ATM ini berkerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Dimana penerima manfaat PKH akan menarik uang melalui ATM bank

terkait setiap tiga bulan sekali, atau setiap pendamping PKH memberitahukan kalau uang sudah masuk ke rekening masing-masing peserta PKH. Adapun jumlahnya bervariasi tergantung jumlah yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat PKH.



Gambar. 4.2. Kartu Sembako PKH

Penggunaan kartu ATM sembako sama dengan penggunaan ATM PKH yang juga berkerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang sudah menjangkau seluruh daerah Aceh khususnya Aceh Besar. Untuk penarikannya sama dengan PKH yaitu 3 bulan sekali dimana dana setiap bulannya berjumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah). Terkait beberapa daerah atau ada beberapa juga bagi penerima kartu sembako bisa di cairkan di toko-toko sembako yang sudah menjalin kerjasama dengan PKH, sehingga lebih memudahkan penerima PKH untuk memperoleh sembako tanpa harus ke ATM terlebih dahulu.

Demikian prosedur pengambilan dana untuk PKH dan sembako. Penerima manfaat PKH hanya memerlukan dua kartu yaitu kartu PKH dan kartu sembako dalam bentuk ATM yang berkerja sama dengan Bank Syariah Indonesia yang sangat memudahkan akses bagi penerima manfaat PKH dikarenakan sudah menjangkau seluruh daerah yang ada di Aceh.

4.1.3. KPM Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta KPM Gampong Bada Sebanyak 17 KPM. Berikut Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Bada.

Tabel.4.1.

Data Penerima PKH Gampong Bada

No.	Nama Penerima	Dusun	Jenis Bantuan
1.	Yusnita	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak
2.	Suwarni	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak dan Balita
3.	Badriah	Teumpok Teungoh	Bantuan Pendidikan Anak
4.	Irawati	Teumpok Teungoh	Bantuan Pendidikan Anak
5.	Fallati	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak
6.	Marina Rusida	Teumpok Teungoh	Bantuan Pendidikan Anak
7.	Siti Juariah	Meunasah Ampeh	Bantuan Pendidikan Anak & Ibu Hamil
8.	Roslaini	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak & Ibu Hamil
9.	Susanti	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak dan balita
10.	Rusni	Teumpok Teungoh	Bantuan Pendidikan Anak
11.	Suraiyya	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak
12.	Nina Aswita	Teumpok teungoh	Bantuan Pendidikan Anak
13.	Mirdawati	Tgk. Dilangga	Bantuan Pendidikan Anak
14.	Asma	Teumpok Teungoh	Bantuan Lansia
15.	Yulidar	Meunasah Ampeh	Bantuan Pendidikan Anak
16.	Ruslidar	Meunasah Ampeh	Sembako
17.	Eli Suwarni	Meunasah Ampeh	Sembako

Sumber : Profil Gampong Bada, 2020.

Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada terlaksana sejak tahun 2012. Pada setiap gampong atau desa memiliki satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk terlaksananya program

dengan baik. Adapun pendamping PKH Gampong Bada Bernama Uswatun Hasanah yang beralamat di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya.

4.2. Hambatan Implementasi PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dalam pengimplementasian PKH di Gampong Bada terdapat beberapa kendala diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketidak jelasan informasi dalam komunikasi mengakibatkan pemahaman yang berbeda akan makna awal dari informasi. Kejelasan dalam memberikan informasi akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada.

Berikut Pernyataan Ibu Uswatun Hasanah selaku Pendamping PKH Gampong Bada :

“Dalam penyampaian informasi kami berusaha menjelaskan sesederhana mungkin sehingga KPM PKH menerima informasi yang mudah di mengerti dan jelas. Namun terkadang ada juga beberapa KPM PKH yang kurang paham, dalam hal ini kami berusaha menjelaskan semaksimal mungkin agar para KPM PKH Paham materi yang kami sampaikan. Salah satu penyebab kurang pahamnya materi mungkin karena belum mengikuti bimtek sebelumnya”⁵²

Secara garis besar pendamping PKH berusaha menjelaskan dengan baik dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin untuk mencapai hasil yang

⁵² Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah Selaku Pendamping PKH Gampong Bada 22 Desember 2021

optimal, yakni agar semua peserta KPM-PKH paham terhadap materi yang disampaikan. Walaupun begitu dalam penyelenggaraannya tetap saja ada beberapa peserta yang juga belum paham, ini biasanya disebabkan karena peserta tidak hadir pada penyelenggaraan bimtek sebelumnya. Disini dibutuhkan usaha lebih dari pendamping PKH untuk menjelaskan lebih rinci materi dari awal hingga ke materi bimtek terbaru. Namun secara keseluruhan peserta KPM-PKH dapat menerima materi dengan baik.

Penulis juga mewawancarai ibu Roslaini selaku KPM PKH Gampong Bada, mengatakan sudah paham dan mengerti atas hal-hal yang disampaikan oleh pendamping PKH Gampong Bada. Berikut hasil wawancaranya :

“Insya Allah saya sudah mengerti buk, mereka menjelaskan dengan baik jadi saya mudah mengerti”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dari pendamping dan peserta PKH di Gampong Bada maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada Kecamatan Ingin jaya sudah cukup baik mengingat masih ada beberapa KPM oleh karena suatu kondisi belum bisa menerima informasi yang optimal dikarenakan Pendamping sebagai penyampai informasi belum dibekali informasi dan KPM sebagai Peserta memiliki tingkat pemahaman yang rendah.

Penyampaian komunikasi kepada pelaksanan kebijakan harus konsisten dan jelas atau tidak berubah-ubah, sehingga para pelaksana kebijakan tidak salah menafsirkan kebijakan yang sudah dibuat.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Roslaini Selaku KPM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

Mengenai konsistensi pedoman dan ketentuan, pendamping PKH Gampong Bada menyampaikan dalam wawancaranya :

“Terkait dengan pedoman dan panduan PKH sering kali berubah-ubah, terutama untuk indeks bantuan dan bahkan pernah dalam 1 tahun dua kali perubahan dilakukan oleh pusat. Apalagi tahun kemarin ada penambahan sembako, jadi kalau kita gak update info dan tidak ikut bimtek, nantinya kita bingung jelaskan ke masyarakat terkait pedoman dan ketentuan terbaru”

Kendala dalam hal komunikasi tidak saja tentang peraturan-peraturan yang berubah atau tidak disampaikan info oleh pendamping, tetapi ada juga tidak sampainya informasi terbaru kepada peserta PKH karena peserta tersebut tidak hadir pada saat pelaksanaan Bimtek oleh pendamping PKH. Tetapi yang sering terjadi kendala adalah kurang updatenya info dari pusat ke para pmdamping PKH.

Ibu Uswatun juga menambahkan :

“Karena berubah-ubahnya ketentuan, tentang indeks bantuan terkadang kami susah jawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh KPM PKH. Bahkan kadang kami dicurigai, info belum jelas kami terima tapi udah sampai info yang simpang siur kepada KPM PKH”⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan PKH Gampong Bada dapat disimpulkan belum konsisten. Hal ini sangat berkaitan dengan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian. Perubahan-perubahan pedoman dan ketentuan yang telat informasinya sampai kepada pendamping PKH, mengakibatkan pendamping PKH sulit menjelaskan kepada KPM PKH.

Dengan seringnya berubah peraturan-peraturan dan ketentuan yang sering dilakukan oleh pusat dengan waktu yang tidak tentu, dan terlambatnya

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah Selaku Pendamping PKH Gampong Bada 22 Desember 2021

diterima informasi oleh pendamping menjadi salah satu hambatan. Adapun dari hambatan ini bisa menimbulkan info-info yang sering salah dan simpang siur kepada para KPM-PKH, yang mana itu merugikan pendamping yang terkadang merasa dicurigai, dan pendamping juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan info-info terbaru yang jelas dan benar untuk kemudian dijelaskan kepada KPM-PKH untuk meluruskan info-info yang belum jelas sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat kendala yang terlihat pada komunikasi yaitu dalam hal konsisten ketentuan-ketentuan dari pusat. Yang mana pedoman ataupun ketentuan-ketentuan terbaru dari pusat tidak terdistribusi dengan baik sampai ke Pendamping PKH. Ini yang menyebabkan salah satu kendala yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Penerima PKH Sudah Graduasi Tapi belum keluar dari sistem

Berikut pandangan mengenai ketetapan sasaran yang diketahui oleh informan yang mewakili jajaran pelaksanaan PKH. Pendataan penerima PKH dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang diperoleh dari Pemerintah dan Non Basis Data Terpadu (Non BDT) dari hasil survey yang dilakukan langsung oleh Tim Pedamping PKH Kecamatan, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku pendamping PKH Gampong Bada yang mengatakan bahwa PKH Gampong Bada sudah tepat sasaran :

“Selama ini pelaksanaan PKH di Gampong Bada saya rasa sudah tepat sasaran. Karena data PKH juga didapat dari data BDT dan kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Dimana data itu nanti akan kita validasi ke lapangan. Biasanya warga kita kumpulkan di meunasah setempat dengan bantuan perangkat desa dalam hal ini pak geuchik atau perangkat desa lainnya untuk menyebarkan undangan kepada warga penerima PKH.

Kemudian di-Validasi apakah warga tersebut sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah, yaitu ibu hamil, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas, apabila nanti ada yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan maka akan di graduasi dengan pemberian bantuan alat usaha seperti mesin jahit dan bantuan modal usaha lainnya”⁵⁵

Menurut pendamping PKH pelaksanaan PKH di Gampong Bada sudah baik karena mereka menjalankan atau membagikan untuk peserta yang terdata di Basis Data Terpadu, yang kemudian di validasi kembali di lapangan jika ada peserta yang menurut hasil musyawarah antara warga, pendamping dan perangkat desa sudah tidak layak lagi menerima PKH maka akan segera di-*graduasi*, yaitu pemutusan pemberian bantuan PKH dengan pemberian bantuan modal usaha, salah satu contohnya adalah dengan pemberian mesin jahit atau bantuan modal usaha lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Kantor Keuchik Gampong Bada terdapat 3 KPM PKH Gampong Bada yang graduasi namun masih ada satu KPM PKH yang masih belum tergraduasi. Graduasi adalah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dikarenakan kondisi sosial ekonominya dan keluarga sudah mampu dan sejahtera serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Terkait hal itu pendamping PKH menyatakan sebagai berikut :

“Terkait satu PKM belum digraduasi itu akan segera digraduasi, penundaan dikarenakan belum di *approve*-nya entry data yang di input di aplikasi PKH”⁵⁶

Dalam hal graduasi peserta PKH sebagai pendamping PKH segera pengajuan untuk perubahan Basis Data terpadu, begitu selesai validasi antara warga, pendamping PKH dan perangkat desa dan disepakati ada warga yang

⁵⁵ Wawancara dengan Pendamping PKH Gampong Bada Ibu Uswatun Hasanah, Tanggal 22 Desember 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah Selaku Pendamping PKH Gampong Bada 22 Desember 2021

graduasi maka selaku pendamping akan meng-input graduasi ke Aplikasi PKH, untuk di graduasi dan diberikan modal usaha. Dalam penerapannya mungkin ada keterlambatan, ini dikarenakan penundaan Approval dari entry data, itu di luar kendali pendamping PKH.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk meminimalisir ketidak tepatan sasaran penerima PKH di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berusaha semaksimal mungkin utnuk mencapai hasil yang semakin baik.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Bantuan PKH di Gampong Bada sudah terlaksana dengan baik, Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Bada, namun masih terdapat kendala terkait dengan Implementasi Bantuan PKH di Gampong Bada.

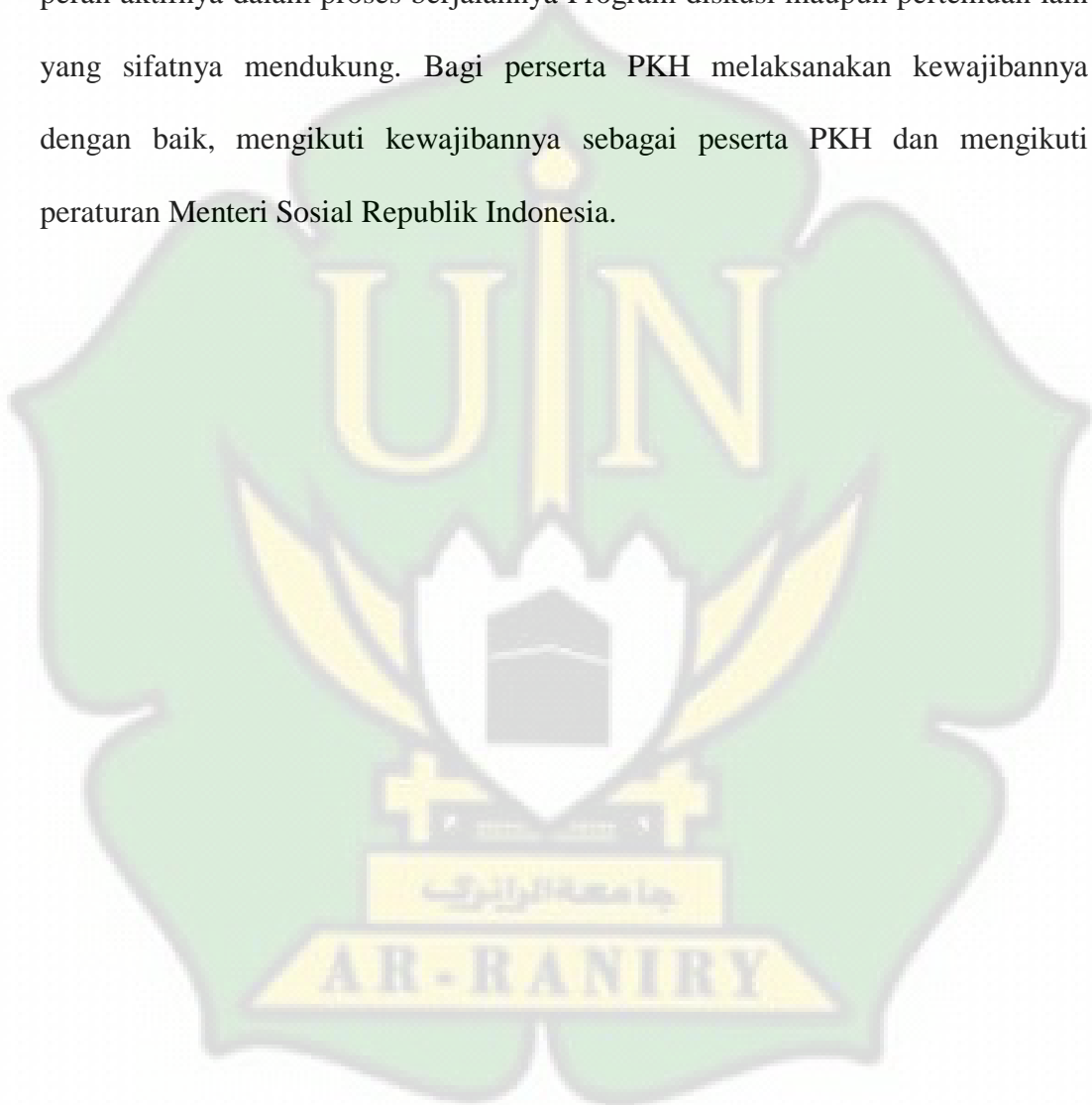
Adapun kendala ataupun hambatan yang membuat pelaksanaan Bantuan PKH belum berjalan maksimal yaitu komunikasi antara pusat dan pendamping belum berjalan maksimal mengenai ketentuan-ketentuan terbaru terkait bantuan PKH. Terhadap penerima yang sudah tidak tepat sasaran, pendamping PKH dan perangkat desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data namun secara system di pusat membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan oleh pihak pendamping dan perangkat desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : Bagi perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dengan PKH di Gampong Bada diharapkan memberikan motivasi kepada peserta PKH sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik

bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi program PKH.

Diharapkan kepada pendamping PKH agar melaksanakan tugas dengan baik dan membuat program yang relevan bagi KPM PKH. Serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya Program diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung. Bagi peserta PKH melaksanakan kewajibannya dengan baik, mengikuti kewajibannya sebagai peserta PKH dan mengikuti peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- B. Sore Uddin dan Sobirin, 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV . Sah Media.
- Badan Pusat Statistik Aceh Besar. 2021. *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka*. BPS Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021. *Profil Kemiskinan di Aceh 2021*. BPS Aceh.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2020
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hayat dkk, 2018. *Reformasi Kebijakan Publik perspektif makro dan mikro*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerima Berkelanjutan Pkh Tahun 2019*. KEMENSOS RI : Jakarta.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori dan Komariah, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono AG, 2016. *Analisi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi, 2013. *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman, 2014. *Kebijakan Publik* (Jakarta:FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Winarno Budi, 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*, (Yogyakarta:Media Pressindo.

Jurnal :

Dedy Utomo dkk, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin". Jurnal Administrasi Public vol.2, no. 1, 2013

Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si dkk, Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di 7 Provinsi. Jurnal penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial tahun 2012.

Khodziah Ismail Kholif, Irwan Noor, Dan Siwidiyanto. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, jurnal s1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang

Mujiburrahman Achsani dkk, 2017. *Dinamika Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya: Kajian Empiris di Negara Maju dan Berkembang*. Repository IPB (diakses pada tanggal 21 November 2020)

Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, dan Carmia Diahloka. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, jurnal S1 ilmu social dan ilmu politik universitas Tribhuwana Tungadewi tahun 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> di akses pada tanggal 20 November 2020

Artikel/Website :

Definisi Kemiskinan menurut Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf> diakses pada 20 November 2020

Definisi Kemiskinan menurut World Bank, <https://documents.worldbank.org/curated/en/897131468038955494/pdf/373490v10revis1100PA0Report0English.pdf>. diakses pada 20 November 2020

Kemiskinan di Aceh Besar turun per tahun 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/08/aceh-besar-target-kemiskinan-turun-284-persen-paling-tinggi-dari-seluruh-kabupatenkota> di akses 18 Desember 2021.

Pengertian Wawancara [https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancaramendalam/#:~:text=Pengertian%20wawancara%2Dmendalam%20\(In%2D,dimana%20pewawancara%20dan%20informan%20terlibat](https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancaramendalam/#:~:text=Pengertian%20wawancara%2Dmendalam%20(In%2D,dimana%20pewawancara%20dan%20informan%20terlibat diakses pada 10 juni 2020) diakses pada 10 juni 2020

Persentase penduduk miskin di tahun 2021 bulan Maret. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> di akses 18 Desember 2021

Persentase Penduduk miskin wilayah perkotaan dan pedesaan provinsi aceh tahun 2020. <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/10/225/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah-perkotaan-perdesaan-provinsi-aceh-tahun-2005-2019.html> diakses pada 20 November 2020

Sebaran data penerima bantuan PKH 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/03/37-keluarga-keluar-dari-daftar-pkh#:~:text=Dijelakkan%20C%20Hingga%20posisi%20juli%202020,tersebar%20seluruh%20kabupaten%20kota> di akses pada 02 Februari 2021

Daftar wawancara dengan informan :

Wawancara dengan Geuchik Gampong Bada, Pada Tanggal 23 Desember 2021

Wawancara dengan Ibu Fallati Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

Wawancara Dengan Ibu Nina Aswita, Selaku KPM PKH Gampong Bada, Pada Tanggal 21 Desember 2021

Wawancara dengan Ibu Roslaini Selaku PKM PKH Gampong Bada tanggal 21 Desember 2021

Wawancara Dengan Ibu Yusnita, Selaku KPM PKH Gampong Bada, Pada Tanggal 21 Desember 2021

Wawancara dengan Pendamping PKH Gampong Bada Ibu Uswatun Hasanah, Tanggal 22 Desember 2021